



2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



**BADAN PENDAPATAN
DAERAH**

Kabupaten Kotabaru
Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Atas ridho Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah berkepentingan dalam mewujudkan siklus manajemen pendapatan daerah yang teratur dan berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk mendukung penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik.

LPPD ini menyajikan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru selama Tahun Anggaran 2023.

Demikian penyusunan LPPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru semoga bermanfaat adanya, atas kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang turut berpartisipasi diucapkan terima kasih.

Kotabaru, Januari 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru



RONNY HENDRAYADI, SE, M.IP

Pembina Utama Madya (IV/a)
NIP. 19761010 200901 1 002

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Penjelasan Umum	1
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	14
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	17
2.2. Akuntabilitas Kinerja	17
BAB III. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
3.1. Tugas Pembantuan Pusat	30
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi	30
3.3. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga	31
3.4. Permasalahan dan Kendala	31
3.5. Saran dan Tindak Lanjut	32
BAB IV. PENUTUP	33
LAMPIRAN III.1 FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN BADAN PENDAPATAN DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

1.1.1. Kedudukan

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Tugas Pokok

Penyelenggaraan pelayanan BAPENDA Kabupaten Kotabaru saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 175 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Daerah Kabupaten Kotabaru.

1.1.3. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang pajak daerah I;
- 4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang pajak daerah II;
- 5) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang penagihan;

- 6) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang pengembangan pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- 7) Penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Penyelenggara pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- 9) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di UPT; dan
- 10) Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

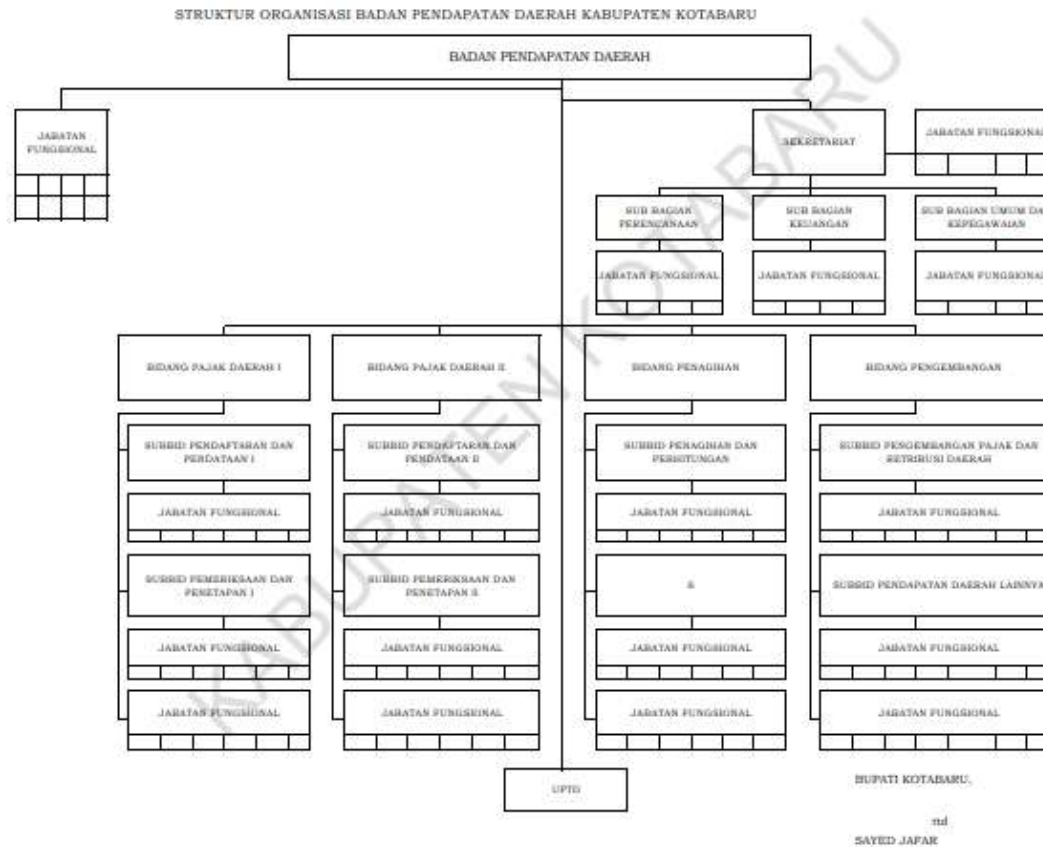
1.1.4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. **Sekretariat**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.
2. **Bidang Pajak Daerah I**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di Bidang Pajak Daerah I yang meliputi pendaftaran dan pendataan I, pemeriksaan dan penetapan I dan pengolahan data dan informasi.
3. **Bidang Pajak Daerah II**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pajak daerah II, pemeriksaan dan penetapan II dan pengolahan data dan informasi II.
4. **Bidang Penagihan**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di Bidang Penagihan yang meliputi penagihan dan perhitungan, pertimbangan dan restitusi dan pembukuan, verifikasi dan pelaporan.
5. **Bidang Pengembangan**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengembangan pajak

dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya, dana transfer dan lain-lain pendapatan pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana transfer.

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 185 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KOTABARU



Gambar 1.1 : Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1.1.5. Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah

Total Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 24.657.321.684,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Realisasi Anggaran dan Belanja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Kegiatan (Kinerja)				Kegiatan (Anggaran)		
			Satuan	Rencana	Capaian	%	Rencana	Capaian	%
	BELANJA					99.06	24,657,321,684	20,180,245,615	81.84
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					98.70	17,884,586,997	14,392,532,902	80.47
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.00	275,947,442	202,257,234	73.30
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100.00	71,735,506	54,205,834	75.56
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kali Koordinasi	2	2	100.00	43,954,536	31,852,000	72.47
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kali Koordinasi	2	2	100.00	21,081,088	15,580,100	73.91
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kali Koordinasi	2	2	100.00	44,324,132	34,592,500	78.04
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kali Koordinasi	2	2	100.00	21,101,945	15,058,300	71.36

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	100.00	47,468,071	34,504,700	72.69
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	100.00	26,282,164	16,463,800	62.64
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100.00	13,369,795,272	10,622,992,078	79.46
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kali Penyediaan	13	13	100.00	12,469,439,740	9,866,546,816	79.13
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kali Pembayaran	12	12	100.00	580,246,952	477,721,226	82.33
11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kali Pelaksanaan	12	12	100.00	187,046,027	168,085,667	89.86
12	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kali Koordinasi	1	1	100.00	86,712,257	82,509,640	95.15
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kali Koordinasi	1	1	100.00	15,347,432	15,345,079	99.98

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	2	2	100.00	7,499,922	7,496,550	99.96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	4	4	100.00	20,499,744	2,287,100	11.16
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100.00	3,003,198	3,000,000	99.89
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					81.62	244,679,219	173,811,792	71.04
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan	4	4	100.00	70,620,000	68,600,000	97.14
20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kali Pendataan	12	12	100.00	17,499,799	15,299,420	87.43
21	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kali Koordinasi	12	12	100.00	20,499,976	16,694,900	81.44
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kali Monitoring	12	12	100.00	16,903,732	15,041,200	88.98

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali Pelaksanaan	4	4	100.00	29,190,712	15,656,600	53.64
23	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	10	50.00	89,965,000	42,519,672	47.26
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				99.14	1,372,083,818	1,148,662,051	83.72
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kali Penyediaan	4	4	100.00	88,719,500	65,632,350	73.98
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kali Penyediaan	12	12	100.00	112,348,032	108,167,903	96.28
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kali Penyediaan	12	12	100.00	268,900,000	193,725,000	72.04
30	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kali Penyediaan	12	12	100.00	268,475,000	244,828,625	91.19
40	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kali	36	19	52.78	10,920,000	3,120,000	28.57
33	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kali Penyediaan	6	5	83.33	39,650,000	26,230,000	66.15
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang Kali	72	72	100.00	483,812,000	452,459,773	93.52

35	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	97.36	4,261,118	4,258,200	99.93
35	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kali Pelaksanaan	4	4	100.00	94,998,168	50,240,200	52.89
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					94.72	1,419,182,000	1,338,453,000	94.31
35	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	10	10	100.00	1,344,182,000	1,338,453,000	99.57
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kali pegadaan	1	0	0.00	75,000,000	-	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98.18	633,034,232	591,231,930	93.40
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	1200	870	72.50	6,300,000	4,500,000	71.43
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kali Pembayaran	144	137	95.14	200,987,540	175,987,130	87.56
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kali Penyediaan	12	12	100.00	425,746,692	410,744,800	96.48

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				84.49	569,865,014	315,124,817	55.30
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	24	18	90.91	143,392,600	80,505,582	56.14
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	24	21	90.91	403,625,469	216,839,235	53.72
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kali	11	10	90.91	22,846,945	17,780,000	77.82
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					100.00	315,300,000	312,179,774	99.01
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					100.00	315,300,000	312,179,774	99.01
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12	100.00	315,300,000	312,179,774	99.01
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					100.00	6,457,434,687	5,475,532,939	84.79
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					100.00	6,457,434,687	5,475,532,939	84.79

	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	2	2	100.00	125,430,387	96,921,912	77.27
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen	4	4	100.00	627,717,705	585,886,170	93.34
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	12	12	100.00	347,979,800	204,282,000	58.71
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	3	3	100.00	1,031,821,500	971,709,140	94.17
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	laporan	12	12	100.00	357,235,794	206,442,987	57.79
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	12	12	100.00	635,181,720	497,022,756	78.25
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Objek Pajak	1000	1000	100.00	865,065,252	764,861,002	88.42
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100.00	233,124,557	216,665,872	92.94
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	7500	7500	100.00	584,059,809	461,325,413	78.99

	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100.00	214,541,786	208,593,754	97.23
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100.00	357,935,831	313,011,746	87.45
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100.00	277,090,900	265,685,220	95.88
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dari pengawasan pajak daerah	Dokumen	12	12	100.00	199,996,792	149,534,839	74.77
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	laporan	12	12	100.00	206,072,854	158,031,609	76.69
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	laporan	4	4	100.00	394,180,000	375,558,519	95.28

Beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya kurang maksimal namun kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik, antara lain Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, hal ini dimungkinkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga adanya efesiensi di beberapa sub kegiatan.

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2.1. Permasalahan Strategis Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, sasaran jangka menengah rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, implementasi rencana strategis dapat teridentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Implementasi Sistem Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Elektronik
- b. Implementasi SmartGov untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Memanfaatkan keterbukaan informasi public untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- d. Penguatan kerjasama dengan SKPD penghasil untuk pengelolaan pendapatan asli daerah;
- e. Peningkatan SDM pegawai dalam melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak;
- f. Memperkuat regulasi pengelolaan pendapatan daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal;
- g. Mengembangkan perangkat teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan SKPD dan wajib pajak;

1.2.2. Keterkaitan Fungsi dengan Visi dan Misi RPJMD

Visi Kabupaten Kotabaru yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026, yaitu : **“Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agrobisnis dan Kepariwisata Serta Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Berkualitas dan Sejahtera “**.

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Adapun salah satu misi yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yaitu **Mengembangkan dan**

meningkatkan sektor-sektor produksi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk menunjang Eko wisata dan agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Pernyataan misi dijabarkan atau diimplementasikan menjadi tujuan. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing dalam mencapai misi dimaksud.

Tujuan menghasilkan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu sasaran yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru dan terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah **Terwujudnya peningkatan PADS, PAD serta potensi keuangan daerah lainnya guna pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan peningkatan sistem pelayanan publik dengan memperhatikan tingkat kepuasan dan menurunnya tingkat keluhan dan komplain terhadap pemerintah.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan Strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun salah satu Strategi yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah **Membuat Sketsa potensi daerah berdasarkan geografis agar pembangunan dan pergerakan ekonomi, sosial dan budaya tidak tumpang tindih dan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktunya serta memenuhi hajat hidup orang banyak.**

Sedangkan kebijakan-kebijakan yang diambil yaitu :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).
2. Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan ekosistem dan kelestarian alam.
3. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD.
4. Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD.
5. Menekan biaya pemungutan Sumber PAD.

6. Mempromosikan Kabupaten Kotabaru untuk menarik investor masuk ke Kab.Kotabaru baik level lokal, regional maupun internasional.
7. Mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru.
8. Melakukan lobi politik dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan DAU dan DAK.

Adapun program yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah **Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**.

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026. Adapun Tujuan dan Sasaran strategis jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam dokumen Rencana Strategis 2021 – 2026, sebagaimana table berikut :

Tabel 1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN RENSTRA
1	2	3	4
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (Kemandirian Fiskal)	Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan tentang pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indicator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang menginformasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja sasaran, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target – target kinerja yang telah ditetapkan.

2.2.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran startegis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026. Target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana di perjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan	8.47%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Layannan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan SOP	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	315,300,000.00	
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,457,434,687.00	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,884,586,997.00	
	TOTAL	24,657,321,684.00	

2.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Utama Tahun 2023

NO	ISU STRATEGIS	KINERJA UTAMA (Tujuan / Sasaran)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (Kemandirian Fiskal)	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan	8.47%	7.87%	131.17%

Berdasarkan tabel. 2.3. capaian kinerja utama Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 yaitu Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Indikator Sasaran Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan di tahun 2023 di targetkan sebesar 8,47%, terealisasi 7,78%, dengan capaian 131,17% dan kategori capaian sangat tinggi. Capaian kinerja melebihi target karena Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai melampaui target Pendapatan Asli Daerah.

Untuk Capaian kinerja penunjang Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Penunjang Tahun 2023

NO	ISU STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI (%)	Capaian (%)
1	2	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan SOP	100.00%	98.06%	80.47%

Berdasarkan tabel 2.4. diatas, capaian kinerja penunjang pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 di targetkan sebesar 100%, terealisasi 98,06%, dengan capaian anggaran sebesar 80,47% dan kategori capaian tinggi.

Sedangkan untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renstra 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Perbandingan Pencapaian Kinerja Utama Tahun 2022 dan 2023

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD	TARGET PADA TAHUN		CAPAIAN PADA TAHUN	
					2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (Kemandirian Fiskal)	Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan	8.23%	8.37%	8.47%	12.45%	7.87%

2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun n-1

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir sebagaimana tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun n-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan	8.47%	12.45%	7.87%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Layannan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan SOP	100%	99.98%	98.06%

Berdasarkan tabel 2.6 diatas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2023 dengan tahun lalu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran ini diukur menggunakan indikator Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan dengan target sebesar 8.47%, terealisasi sebesar 7.78%.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran ini diukur menggunakan indikator Persentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan SOP dengan target sebesar 100%, terealisasi sebesar 98.06%.

2.2.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

Realisasi kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target s.d. akhir periode Rencana Strategis sebagaimana tabel 2.7.

Tabel 2.7.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dengan Target Akhir Periode Rencana Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d akhir Renstra	Realisasi s.d. 2022	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan	9.29%	7.87%	83.74%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Layannan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan SOP	100%	98.06%	98.06%

Berdasarkan tabel 2.7 diatas, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target s.d. akhir periode rencana startegis (tahun 2026) sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan di tahun 2023 sebesar 7.78, jika dibandingkan dengan target s.d. akhir periode rencana strategis (tahun 2026) yakni sebesar 9.29% maka tingkat kemajuan sebesar 83.74%.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Persentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan SOP di tahun 2023 sebesar 98.06%, jika dibandingkan dengan target s.d. akhir periode rencana strategis (tahun 2026) yakni sebesar 98.06%.

2.2.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 meliputi :

a. Keuangan

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotbaru tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran/Program	Indikator	Satuan Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan	%	8.47%	7.87%	92.92%	6,772,734,687	5,787,712,713	85.46%
	1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	%	100.00%	100.00%	100.00%	315,300,000	312,179,774	99.01%
	2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100.00%	100.00%	100.00%	6,457,434,687	5,475,532,939	84.79%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan SOP	%	100.00%	99.06%	99.06%	17,884,586,997	14,392,532,902	80.47%

	3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100.00%	98.70%	98.70%	17,884,586,997	14,392,532,902	80.47%
JUMLAH TOTAL							24,657,321,684	20,180,245,615	81.84%

Tabel 2.9.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan	91.85%	85.46%	7.48%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan SOP	99.06%	80.47%	23.09%
JUMLAH TOTAL				82.97%	15.29%

Efisiensi penggunaan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja APBD – P Tahun 2023 sebesar Rp. 6.457.434.687,- (7,48%), yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.657.321.684,- terealisasi sebesar Rp. 20.180.245.615,- (81,84%). Efisiensi tersebut bersumber dari beberapa belanja.

b. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari beberapa kegiatan berikut :

1. Dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat, selain dilakukan secara langsung, juga dilakukan melalui SIAP LAPOR! dan website dan media social milik Pemkab, sehingga untuk masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota dapat menghemat biaya dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, yang kemudian didistribusikan kepada SKPD terkait untuk segera ditindaklanjuti.
2. Dalam hal penyampaian informasi mengenai pajak dan retribusi daerah pada wajib pajak/masyarakat, dilaksanakan melalui media luar ruang seperti Baliho, spanduk, media elektronik, dan media

cetak serta social media milik Pemkab dengan demikian informasi dapat tersampaikan pada masyarakat lebih menyeluruh, cepat dan tepat sasaran.

3. Penguatan Sistem Pelayanan dan Administrasi Perpajakan menggunakan smartGov, CityGov dan Sistem Pembayaran Online menggunakan AMPLANG, gojek, QRIS dan EDC.

c. Sumberdaya Manusia

Dengan didukung SDM ASN sebanyak 46 orang dan Non ASN sebanyak 24 orang, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dapat terlaksana dengan baik, Hal ini dilakukan antara lain dengan memaksimalkan pembagian bebas tugas pegawai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas, serta melibatkan tim tejbis pada beberapa kegiatan.

2.2.6. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Adapun pogram/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.0
Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran			Analisa
			Alokasi	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1) Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	315,300,000	312,179,774	100	Faktor Penunjang keberhasilan : a. Sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintan provinsi dan pusat b. Sinergitas antara BAPENDA dengan SKPD Penghasil c. Pengelolaan data Informasi pajak dan retribusi daerah yang aktif didukung dengan penguatan sistem pembayaran online yang kuat dalam melaksanakan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
		1) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	315,300,000	312,179,774	100	
		2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,457,434,687	5,475,532,939	100	

		1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	6,457,434,687	5,475,532,939	100	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,884,586,997	14,392,532,902	98.70	
	1) Persentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan SOP	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275,947,442	202,257,234	100.00	Faktor Penunjang Keberhasilan : a. Penyediaan prasarana intranet dan internet yang memadai menunjang kinerja pelayanan
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,369,795,272	10,622,992,078	100.00	
		3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	244,679,219	173,811,792	81.62	
		4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,372,083,818	1,148,662,051	99.14	
		5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1,419,182,000	1,338,453,000	94.72	

		Pemerintah Daerah				
		6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633,034,232	591,231,930	98.18	
		7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569,865,014	315,124,817	84.49	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat

Pada tahun 2023 tidak ada tugas pembantuan dari kementerian/Lembaga untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, sehingga untuk matriks capaian kinerja pelaksanaan pembantuan pusat tidak ada/nihil sebagaimana table 3.1. berikut :

Tabel 3.1. Matriks Capaian Kinerja
Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan. Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			N I H I L								

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi

Pada tahun 2023 tidak ada tugas pembantuan dari provinsi untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, sehingga untuk matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan provinsi tidak ada/nihil sebagaimana table 3.2. berikut :

Tabel 3.2.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pemabantuan Provinsi

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.3. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru selama tahun 2023 melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang dan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tentang Penerimaan Pembayaran/Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara Online di Kabupaten Kotabaru dan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan EDC Bank Kalsel;
2. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), TBK tentang Pekerjaan Layanan JAAs Layanan Internet Tahun Anggaran 2023;
3. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perombangan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Kotabaru.

3.4. Permasalahan dan Kendala

Pada tahun 2023 tidak ada tugas pembantuan dari kementerian/Lembaga maupun provinsi untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sehingga permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan tidak ada/nihil sebagaimana table 3.3. berikut :

Tabel 3.3. Permasalahan dan Kendala

No	Permasalahan dan Kendala	Ket
	<i>NIHIL</i>	

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

No	Permasalahan dan Kendala	Ket
	<i>NIHIL</i>	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran masukan dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan agar penyusunan LPPD tahun berikutnya dapat lebih sempurna,.

Demikian laporan ini disusun, sebagai salah satu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kotabaru, Januari 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru



RONNY HENDRAYADI, SE, M.IP

Pembina Utama Madya (IV/a)
NIP. 19761010 200901 1 002

LAMPIRAN

FORMULIR E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Kotabaru
Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru
Periode Pelaksanaan Bulan Desember 2023

Kode Program dan Kegiatan					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV							
1					3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12	15		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	Rp		
					BELANJA				24,657,321,684		2,517,143,750.00		1,435,877,319		8,704,663,892		7,522,560,654		20,180,245,615	20,180,245,615		
					NON URUSAN				17,884,586,997		1,923,549,731.00		1,105,937,305		6,139,300,341		5,223,745,525		14,392,532,902	14,392,532,902		
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17,884,586,997		1,923,549,731.00		1,105,937,305		6,139,300,341		5,223,745,525		14,392,532,902	14,392,532,902		
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				275,947,442	-	33,503,234.00		46,506,900		42,236,000		80,011,100		202,257,234	202,257,234		
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	71,735,506	-	13,082,834.00	-	13,926,200	4	18,252,400	1	8,944,400	5	Dokumen	54,205,834	54,205,834	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	2	Kali Koordinasi	43,954,536	-	1,824,900.00	-	10,200,000	1	4,907,200	1	14,919,900	2	Kali Koordinasi	31,852,000	31,852,000	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Kali Koordinasi	21,081,088	-	1,738,200.00	-	4,435,200	1	5,248,400	1	4,158,300	2	Kali Koordinasi	15,580,100	15,580,100	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	Kali Koordinasi	44,324,132	-	5,750,000.00	-	6,619,100	1	6,903,000	1	15,320,400	2	Kali Koordinasi	34,592,500	34,592,500	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	Kali Koordinasi	21,101,945	-	1,519,100.00	-	2,388,200	1	869,000	1	10,282,000	2	Kali Koordinasi	15,058,300	15,058,300	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	47,468,071	-	8,069,100.00	-	8,069,100	2	5,000,000	2	13,366,500	4	Dokumen	34,504,700	34,504,700	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen	26,282,164	3	1,519,100.00	1	869,100	1	1,056,000	7	13,019,600	12	Dokumen	16,463,800	16,463,800	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13,369,795,272		1,373,810,738.00		943,776,338		4,041,984,243		4,263,420,759		10,622,992,078	10,622,992,078		
X	XX	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13	Kali Penyediaan	12,469,439,740	3	1,185,661,326.00	3	864,625,588	3	3,707,485,743	4,0	4,118,774,159	13	Kali Penyediaan	9,866,546,816	9,866,546,816	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Kali Pembayaran	580,246,952	3	134,099,226.00	1	41,180,000	5	208,032,000	3,0	94,410,000	12	Kali Pembayaran	477,721,226	477,721,226	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Kali Pelaksanaan	187,046,027	3	43,979,567.00	1	24,151,500	5	62,828,000	3,0	37,126,600	12	Kali Pelaksanaan	168,085,667	168,085,667	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Kali Koordinasi	86,712,257	1	6,164,540.00	-	11,305,100	-	51,930,000	-	13,110,000	1	Kali Koordinasi	82,509,640	82,509,640	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Kali Koordinasi	15,347,432	-	3,906,079.00	-	6,542,600	1	4,896,400	-	-	1	Kali Koordinasi	15,345,079	15,345,079	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2	Dokumen	7,499,922	-	-	-	5,971,550	2	1,525,000	-	-	2	Dokumen	7,496,550	7,496,550	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Dokumen	20,499,744	-	-	-	-	2	2,287,100	2,0	-	4	Dokumen	2,287,100	2,287,100	Subbag Perencanaan

Kode Program dan Kegiatan						Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2023	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)	Unit SKPD Penanggung Jawab		
									I		II		III		IV							
1						3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp		
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	3,003,198	-	-	-	-	1	3,000,000	-	-	1	Dokumen	3,000,000	3,000,000	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				244,679,219		6,466,380.00		10,634,480		21,403,980		135,306,952		173,811,792	173,811,792		
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	4	Pengadaan	70,620,000	-	-	-	-	-	-	4.0	68,600,000	4	Pengadaan	68,600,000	68,600,000	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Kali Pendataan	17,499,799	3	4,636,380.00	1	1,112,080	3	4,560,780	5.0	4,990,180	12	kali pendataan	15,299,420	15,299,420	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Kali Koordinasi	20,499,976	3	1,830,000.00	1	4,515,900	6	6,150,500	2.0	4,198,500	12	kali koordinasi	16,694,900	16,694,900	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Kali Monitoring	16,903,732	3	-	2	5,006,500	2	3,081,100	5.0	6,953,600	12	kali monitoring	15,041,200	15,041,200	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Kali Pelaksanaan	29,190,712	-	-	-	-	2	7,611,600	2.0	8,045,000	4	Kali Pelaksanaan	15,656,600	15,656,600	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	orang	89,965,000				-	-	-	10.0	42,519,672	10		42,519,672	42,519,672	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,372,083,818		167,918,115.00		37,783,900		629,363,180		313,596,856		1,148,662,051	1,148,662,051.00		
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Kali Penyediaan	88,719,500	-	1,993,700.00	-	-	3	12,251,200	1.0	51,387,450	4	kali penyediaan	65,632,350	65,632,350	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Kali Penyediaan	112,348,032	3	15,716,039.00	1	7,833,900	5	54,110,564	3.0	30,507,400	12	kali penyediaan	108,167,903	108,167,903	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Kali Penyediaan	268,900,000	3	30,525,000.00	1	-	5	108,945,000	3.0	54,255,000	12	kali penyediaan	193,725,000	193,725,000	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Kali Penyediaan	268,475,000	3	-	1	-	5	209,782,625	3.0	35,046,000	12	kali penyediaan	244,828,625	244,828,625	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36	Kali	10,920,000	2	780,000.00	-	260,000	6	1,300,000	11.0	780,000	19	Kali Pembayaran	3,120,000	3,120,000	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan	6	Kali Penyediaan	39,650,000	-	-	-	-	4	24,400,000	1.0	1,830,000	5	kali penyediaan	26,230,000	26,230,000	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Orang Kali	483,812,000	12	106,003,176.00	3	18,614,000	38	207,173,791	19.0	120,668,806	72	Orang Kali	452,459,773	452,459,773	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	4,261,118	3	1,982,700.00	1	-	-	-	8.0	2,275,500	12	dokumen	4,258,200	4,258,200	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Kali Pelaksanaan	94,998,168	1	10,917,500.00	-	11,076,000	1	11,400,000	2.0	16,846,700	4	kali pelaksanaan	50,240,200	50,240,200	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				1,419,182,000		198,634,000.00		-		1,139,819,000		-		1,338,453,000	1,338,453,000.00		
X	XX	01	2.1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	unit	1,344,182,000	10	198,634,000.00				1,139,819,000	-	-	10	Unit	1,338,453,000	1,338,453,000	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Kali Pengadaan	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unit pemeliharaan	-	-	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				633,034,232		135,386,917.00		56,503,604		235,239,536		164,101,873		591,231,930	591,231,930		
X	XX	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200	Lembar	6,300,000	220	1,000,000.00	-	-	300	1,500,000	350	2,000,000	870	lembar	4,500,000	4,500,000	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144	Kali Pembayaran	200,987,540	36	36,886,917.00	11	24,003,604	55	71,239,536	35	43,857,073	137	kali pembayaran	175,987,130	175,987,130	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Kali Penyediaan	425,746,692	3	97,500,000.00	1	32,500,000	5	162,500,000	3	118,244,800	12	kali penyediaan	410,744,800	410,744,800	Subbag Umpeg

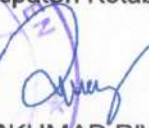
Kode Program dan Kegiatan					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2023			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)	Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV						
1					3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12	15		
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp		
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24	Unit	143,392,600	2	7,830,347.00	1	8,902,083	6	20,936,902	9	42,836,250	18	Unit pemeliharaan	80,505,582	80,505,582	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24	Unit	403,625,469	-	-	-	-	4	6,937,500	17	209,901,735	21	Unit pemeliharaan	216,839,235	216,839,235	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	11	Kali	22,846,945	-	-	-	1,830,000	4	1,380,000	6	14,570,000	10	Kali Pemeliharaan	17,780,000	17,780,000	Subbag Umpeg
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
5	02				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)				6,772,734,687		593,594,019.00		329,940,014		2,565,363,551		2,298,815,129		5,787,712,713	5,787,712,713		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				315,300,000		38,195,811.00		18,576,160		198,406,998		57,000,805		312,179,774	312,179,774	Bidang Pengembangan	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				315,300,000		38,195,811.00		18,576,160		198,406,998		57,000,805		312,179,774	312,179,774		
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Asistensi, Sinkronisasi,	Jumlah Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi,	12	Dokumen	315,300,000	3	38,195,811.00	1	18,576,160	6	198,406,998	2	57,000,805	12	Dokumen	312,179,774	312,179,774	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				6,457,434,687		555,398,208.00		311,363,854		2,366,956,553		2,241,814,324		5,475,532,939	5,475,532,939		
5	02	04	2		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				6,457,434,687		555,398,208.00		311,363,854		2,366,956,553		2,241,814,324		5,475,532,939	5,475,532,939		
5	02	04	2	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2	Dokumen	125,430,387		-	-	-	-	8,787,180	2	88,134,732	2	Dokumen	96,921,912	96,921,912	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,	4	Dokumen	627,717,705	1	90,152,120.00	1	3,289,900	1	272,266,250	1	220,177,900	4	Dokumen	585,886,170	585,886,170	Bidang Pengembangan
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	laporan	347,979,800	3	18,793,000.00	3	5,417,000	3	138,257,900	3	41,814,100	12	laporan	204,282,000	204,282,000	Bidang Pengembangan
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	3	unit	1,031,821,500	-	17,766,730.00	-	27,046,527	2	295,448,057	1	631,447,826	3	unit	971,709,140	971,709,140	Bidang PD I
5	02	04	2	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	12	laporan	357,235,794	3	67,135,923.00	3	28,135,944	3	67,133,120	3	44,038,000	12	laporan	206,442,987	206,442,987	Bidang PD II
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	12	laporan	635,181,720	3	82,796,996.00	3	88,851,808	3	67,897,103	3	257,476,849	12	laporan	497,022,756	497,022,756	Bidang PD II
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	1000	Objek Pajak	865,065,252	398	69,675,998.00	402	40,915,823	-	537,372,539	200	116,896,642	1,000	Objek Pajak	764,861,002	764,861,002	Bidang PD II
5	02	04	2	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah	12	Dokumen	233,124,557	3	27,076,562.00	3	2,800,000	3	106,141,235	3	80,648,075	12	Dokumen	216,665,872	216,665,872	Bidang PD I
5	02	04	2	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7500	layanan	584,059,809	3	21,109,396.00	1	7,793,116	-	301,144,431	7,496	131,278,470	7,500	layanan	461,325,413	461,325,413	Bidang PD I
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12	Dokumen	214,541,786	3	21,857,275.00	3	29,235,296	3	84,147,332	3	73,353,851	12	Dokumen	208,593,754	208,593,754	Bidang Penagihan


Kode Program dan Kegiatan					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2023	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
								I		II		III		IV								
1					3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12	15		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp			
5	02	04	2	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	357,935,831	3	49,604,411.00	3	33,224,000	3	145,862,817	3	84,320,518	12	Dokumen	313,011,746	313,011,746	Bidang Penagihan
5	02	04	2	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	277,090,900	3	34,435,601.00	3	32,891,037	3	104,976,917	3	93,381,665	12	Dokumen	265,685,220	265,685,220	Bidang Penagihan
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta	12	Dokumen	199,996,792	3	28,094,978.00	3	2,044,000	3	47,209,000	3	72,186,861	12	Dokumen	149,534,839	149,534,839	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak	12	laporan	206,072,854	3	14,720,518.00	3	7,590,603	3	76,241,572	3	59,478,916	12	laporan	158,031,609	158,031,609	Bidang PD I
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi	4	laporan	394,180,000	1	12,178,700.00	1	2,128,800	1	114,071,100	1	247,179,919	4	laporan	375,558,519	375,558,519	Bidang PD I
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
									24,657,321,684		2,517,143,750.00		1,435,877,319		8,704,663,892		7,522,560,654			20,180,245,615	20,180,245,615	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD berikutnya *) :																						
*) Diisi oleh Kepala Bappeda												KHAIRIAN ANSHARI, S.STP, M.Si NIP. 19830216 200112 1 001										

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kabupaten : Kotabaru
Nama Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Tugas : Merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah.

NO	ISU STRATEGIS	KINERJA UTAMA (Tujuan / Sasaran)	INDIKATOR	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (Kemandirian Fiskal)	Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan	$\frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Total PD}} \times 100 \%$ <p>Semakin meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah tahun ini maka menunjukkan peningkatan jumlah penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain-lain PAD yang sah dari tahun sebelumnya sehingga meningkat pula peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah</p>	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Kepala Badan	

Kotabaru, Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru,

Drs. H. AKHMAD RIVAI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630924 198503 1 011



LAPORAN RELISASI PENERIMAAN PENDAPATAN
PER RINCIAN OBYEK PENDAPATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
PERIODE : 01 JANUARI S/D 31 DECEMBER 2023

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2023	PENERIMAAN			% S/D BLN INI	JUMLAH LEBIH/ (KURANG)	KET
			PERIODE		S/D TANGGAL			
			01/01/2023 S/D 30/11/2023	01/12/2023 S/D 31/12/2023	31/12/2023			
1	2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.466.225.503,00	178.283.556.083,85	26.853.258.808,11	205.136.814.891,86	132,80	50.670.589.388,86	
4	PAJAK DAERAH	75.738.668.873,00	61.181.168.386,00	8.245.836.449,00	69.427.004.835,00	91,67	(6.311.664.038,00)	
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	75.738.668.873,00	61.181.168.386,00	8.245.836.449,00	69.427.004.835,00	91,67	(6.311.664.038,00)	
4	PAJAK HOTEL	606.716.323,00	608.918.821,00	11.118.182,00	620.037.003,00	102,20	13.320.680,00	
4	Pajak Hotel	581.716.323,00	571.871.692,00	10.868.182,00	582.739.874,00	100,18	1.023.551,00	
4	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	25.000.000,00	37.047.129,00	250.000,00	37.297.129,00	149,19	12.297.129,00	
4	PAJAK RESTORAN	7.275.398.413,00	9.080.161.843,00	1.037.730.954,00	10.117.892.797,00	139,07	2.842.494.384,00	
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.288.398.413,00	4.258.056.368,00	922.154.171,00	5.180.210.539,00	157,53	1.891.812.126,00	
4	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	375.000.000,00	317.499.789,00	12.597.638,00	330.097.427,00	88,03	(44.902.573,00)	
4	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	7.000.000,00	2.998.900,00	-	2.998.900,00	42,84	(4.001.100,00)	
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.300.000.000,00	4.188.362.986,00	87.680.245,00	4.276.043.231,00	129,58	976.043.231,00	
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	305.000.000,00	313.243.800,00	15.298.900,00	328.542.700,00	107,72	23.542.700,00	
4	PAJAK HIBURAN	144.000.000,00	150.391.814,00	27.274.145,00	177.665.959,00	123,38	33.665.959,00	
4	Pajak Tontonan Film	60.000.000,00	75.215.000,00	22.874.000,00	98.089.000,00	163,48	38.089.000,00	
4	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	56.000.000,00	55.692.671,00	3.750.600,00	59.443.271,00	106,15	3.443.271,00	
4	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.000.000,00	3.445.800,00	-	3.445.800,00	114,86	445.800,00	
4	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	4.000.000,00	2.270.961,00	-	2.270.961,00	56,77	(1.729.039,00)	
4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)	13.500.000,00	2.143.182,00	189.545,00	2.332.727,00	17,28	(11.167.273,00)	
4	Pajak Pusat Kebugaran	-	6.985.000,00	340.000,00	7.325.000,00	-	7.325.000,00	
4	Pajak Pertandingan Olahraga	7.500.000,00	4.639.000,00	120.000,00	4.759.000,00	63,45	(2.741.000,00)	
4	PAJAK REKLAME	350.000.000,00	371.097.764,00	1.453.500,00	372.551.264,00	106,44	22.551.264,00	
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	325.000.000,00	327.516.052,00	900.000,00	328.416.052,00	101,05	3.416.052,00	
4	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	43.581.712,00	553.500,00	44.135.212,00	176,54	19.135.212,00	
4	PAJAK PENERANGAN JALAN	23.133.013.429,00	23.327.726.298,00	2.485.596.898,00	25.813.322.286,00	111,59	2.680.308.857,00	
4	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PPJ PLN)	20.880.993.153,00	21.040.846.441,00	2.138.530.715,00	23.179.377.156,00	111,01	2.298.384.003,00	
4	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ NON PLN)	2.252.020.276,00	2.286.878.857,00	347.066.273,00	2.633.945.130,00	116,96	381.924.854,00	
4	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	22.389.353.576,00	19.973.744.880,00	2.140.782.500,00	22.114.527.180,00	98,77	(274.826.396,00)	
4	Pajak Batu Kapur	17.750.534.560,00	14.765.947.812,00	1.325.612.598,00	16.091.560.408,00	90,65	(1.658.974.152,00)	
4	Pajak MBL Batu Gunung	-	1.539.707.788,00	42.861.474,00	1.582.569.262,00	-	1.582.569.262,00	
4	Pajak MBL Pasir dan Kerikil	1.663.004.520,00	1.462.269.976,00	601.678.785,00	2.063.948.761,00	124,11	400.944.241,00	
4	Pajak MBL Tanah Timbun/Urug	-	1.807.465.828,00	82.851.380,00	1.890.317.008,00	-	1.890.317.008,00	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	04	1	1	06	32	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) / Laterit	968.160.000,00	398.353.476,00	87.778.265,00	486.131.741,00	50,21	(482.028.259,00)	
4	4	04	04	1	1	06	33	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.007.654.496,00			-	-	(2.007.654.496,00)	
4	4	04	04	1	1	07		Pajak Parkir	110.187.132,00	99.881.850,00	12.563.700,00	112.445.550,00	102,05	2.258.418,00	
4	4	04	04	1	1	07	01	Pajak Parkir	110.187.132,00	99.881.850,00	12.563.700,00	112.445.550,00	102,05	2.258.418,00	
4	4	04	04	1	1	08		PAJAK AIR BAWAH TANAH	30.000.000,00	18.548.859,00	12.427.376,00	30.976.235,00	103,25	976.235,00	
4	4	04	04	1	1	08	01	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	18.548.859,00	12.427.376,00	30.976.235,00	103,25	976.235,00	
4	4	04	04	1	1	09		PAJAK SARANG BURUNG WALET	1.200.000.000,00	701.260.200,00	2.237.000,00	703.497.200,00	58,62	(498.502.800,00)	
4	4	04	04	1	1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet	1.200.000.000,00	701.260.200,00	2.237.000,00	703.497.200,00	58,62	(498.502.800,00)	
4	4	04	04	1	1	11		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN	2.500.000.000,00	2.964.629.265,00	47.631.804,00	3.012.261.069,00	120,49	512.261.069,00	
4	4	04	04	1	1	11	00	PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan	2.500.000.000,00	2.964.629.265,00	47.631.804,00	3.012.261.069,00	120,49	512.261.069,00	
4	4	04	04	1	1	12		BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	18.000.000.000,00	3.884.808.192,00	2.467.020.300,00	6.351.828.492,00	35,29	(11.648.171.508,00)	
4	4	04	04	1	1	12	01	BPHTB - Pemindahan Hak	16.307.600.300,00	1.172.200.494,00	151.415.200,00	1.323.615.694,00	8,12	(14.983.984.806,00)	
4	4	04	04	1	1	12	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	1.692.399.700,00	2.712.607.698,00	2.315.605.100,00	5.028.212.798,00	297,11	3.335.813.098,00	
4	x	x	xx	1	2			RETRIBUSI DAERAH	7.418.050.505,00	6.924.522.575,00	919.167.223,00	7.843.689.798,00	105,77	427.639.293,00	
4	1	02	01	1	2			DINAS KESEHATAN	1.100.000.000,00	1.172.541.086,00	101.121.298,00	1.273.662.382,00	115,79	173.662.382,00	
4	1	02	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	1.000.000.000,00	1.069.227.086,00	89.288.296,00	1.158.515.382,00	115,85	158.515.382,00	
4	1	02	01	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.069.227.086,00	89.288.296,00	1.158.515.382,00	115,85	158.515.382,00	
4	1	02	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	100.000.000,00	103.314.000,00	11.833.000,00	115.147.000,00	115,15	15.147.000,00	
4	1	02	01	1	2	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	100.000.000,00	103.314.000,00	11.833.000,00	115.147.000,00	115,15	15.147.000,00	
4	1	03	03	1	2			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	757.500.000,00	1.104.659.800,00	349.200.000,00	1.453.859.800,00	191,93	698.359.800,00	
4	1	03	03	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	-	-	-	-	-	-	
4	1	03	03	1	2	01	37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (GARIS)	-	-	-	-	-	-	
4	1	03	03	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	250.000.000,00	315.300.000,00	341.400.000,00	656.700.000,00	262,68	406.700.000,00	
4	1	03	03	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	315.300.000,00	341.400.000,00	656.700.000,00	262,68	406.700.000,00	
4	1	03	03	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	507.500.000,00	789.359.800,00	7.800.000,00	797.159.800,00	157,08	289.659.800,00	
4	1	03	03	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	788.544.800,00	7.800.000,00	796.344.800,00	159,27	296.344.800,00	
4	1	03	03	1	2	03	09	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	7.500.000,00	815.000,00	-	815.000,00	10,87	(6.685.000,00)	
4	2	01	01	1	2			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20.000.000,00	19.250.000,00	1.200.000,00	20.450.000,00	102,25	450.000,00	
4	2	01	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	20.000.000,00	19.250.000,00	1.200.000,00	20.450.000,00	102,25	450.000,00	
4	2	01	01	1	2	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	20.000.000,00	19.250.000,00	1.200.000,00	20.450.000,00	102,25	450.000,00	
4	2	01	01	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-	-	-	-	-	
4	2	01	01	1	2	03	12	Retribusi Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Asing-LRA	-	-	-	-	-	-	
4	2	05	01	1	2			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	105.000.000,00	86.275.000,00	6.650.000,00	92.925.000,00	88,50	(12.075.000,00)	
4	2	05	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	105.000.000,00	86.275.000,00	6.650.000,00	92.925.000,00	88,50	(12.075.000,00)	
4	2	05	01	1	2	01	07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	105.000.000,00	86.275.000,00	6.650.000,00	92.925.000,00	88,50	(12.075.000,00)	
4	2	09	01	1	2			DINAS PERHUBUNGAN	1.428.500.000,00	1.027.803.500,00	101.859.000,00	1.129.662.500,00	79,08	(298.837.500,00)	
4	2	09	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	650.000.000,00	446.515.500,00	63.779.000,00	510.294.500,00	78,51	(139.705.500,00)	
4	2	09	01	1	2	01	19	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250.000.000,00	232.548.500,00	47.379.000,00	279.927.500,00	111,97	29.927.500,00	
4	2	09	01	1	2	01	27	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	400.000.000,00	213.967.000,00	16.400.000,00	230.367.000,00	57,59	(169.633.000,00)	
4	2	09	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	743.500.000,00	570.488.000,00	37.880.000,00	608.368.000,00	81,82	(135.132.000,00)	
4	2	09	01	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	38.193.500,00	-	38.193.500,00	76,39	(11.806.500,00)	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	2	09	01	1	2	02	13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	15.000.000,00	9.301.000,00	2.025.000,00	11.326.000,00	75,51	(3.674.000,00)	
4	2	09	01	1	2	02	14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	7.500.000,00	6.500.000,00	700.000,00	7.200.000,00	96,00	(300.000,00)	
4	2	09	01	1	2	02	16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	571.000.000,00	440.996.500,00	26.247.000,00	467.243.500,00	81,83	(103.756.500,00)	
4	2	09	01	1	2	02	20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	100.000.000,00	75.497.000,00	8.908.000,00	84.405.000,00	84,41	(15.595.000,00)	
4	2	09	01	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	35.000.000,00	10.800.000,00	200.000,00	11.000.000,00	31,43	(24.000.000,00)	
4	2	09	01	1	2	03	06	Retribusi Pemberian Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	35.000.000,00	10.800.000,00	200.000,00	11.000.000,00	31,43	(24.000.000,00)	
4	2	11	01	1	2			DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.437.728.985,00	2.228.252.019,00	250.658.967,00	2.478.910.986,00	101,69	41.182.001,00	
4	2	11	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	482.000.000,00	434.566.394,00	51.057.803,00	485.624.197,00	105,11	23.624.197,00	
4	2	11	01	1	2	01	07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	96.000.000,00	87.725.000,00	9.030.000,00	96.755.000,00	100,79	755.000,00	
4	2	11	01	1	2	01	22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	286.000.000,00	260.223.944,00	25.441.703,00	285.665.647,00	107,39	19.665.647,00	
4	2	11	01	1	2	01	45	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya	100.000.000,00	86.617.450,00	16.586.100,00	103.203.550,00	103,20	3.203.550,00	
4	2	11	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	1.975.728.985,00	1.793.685.625,00	199.601.164,00	1.993.286.789,00	100,89	17.557.804,00	
4	2	11	01	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.000.000,00	55.788.000,00	5.344.000,00	61.132.000,00	127,36	13.132.000,00	
4	2	11	01	1	2	02	05	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/ Pertokoan yang dikontrakan	1.697.328.985,00	1.530.177.625,00	168.907.164,00	1.699.084.789,00	100,10	1.755.804,00	
4	2	11	01	1	2	02	18	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	230.400.000,00	207.720.000,00	25.350.000,00	233.070.000,00	101,16	2.670.000,00	
4	3	01	01	1	2			DINAS PERIKANAN	171.571.520,00	128.647.920,00	11.319.960,00	139.967.880,00	81,58	(31.603.640,00)	
4	3	01	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	171.571.520,00	128.647.920,00	11.319.960,00	139.967.880,00	81,58	(31.603.640,00)	
4	3	01	01	1	2	02	26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Bibit atau Benih Ikan)	108.000.000,00	92.867.400,00	-	92.867.400,00	85,99	(15.132.600,00)	
4	3	01	01	1	2	02	33	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan - Fasilitas Lainnya di Lingkungan TPI	63.571.520,00	35.780.520,00	11.319.960,00	47.100.480,00	74,09	(16.471.040,00)	
4	3	02	02	1	2			DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.375.750.000,00	1.114.827.000,00	89.008.000,00	1.203.835.000,00	87,50	(171.915.000,00)	
4	3	02	02	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	1.375.750.000,00	1.114.827.000,00	89.008.000,00	1.203.835.000,00	87,50	(171.915.000,00)	
4	3	02	02	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	264.150.000,00	324.940.000,00	44.399.000,00	369.339.000,00	139,82	105.189.000,00	
4	3	02	02	1	2	02	16	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	32.102.000,00	5.104.000,00	37.206.000,00	93,02	(2.794.000,00)	
4	3	02	02	1	2	02	21	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.071.600.000,00	757.785.000,00	39.505.000,00	797.290.000,00	74,40	(274.310.000,00)	
4	4	04	04	1	2			BADAN PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	42.266.250,00	8.150.000,00	50.416.250,00	252,08	30.416.250,00	
4	4	04	04	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	-	-	-	-	-	-	
4	4	04	04	1	2	01	20	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	-	-	-	-	-	-	
4	4	04	04	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	20.000.000,00	42.266.250,00	8.150.000,00	50.416.250,00	252,08	30.416.250,00	
4	4	04	04	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	42.266.250,00	8.150.000,00	50.416.250,00	252,08	30.416.250,00	
4	4	04	04	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-	-	-	-	-	
4	4	04	04	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	-	-	-	
4	x	x	xx	1	3			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11.839.290.722,00	11.835.389.546,00	-	11.835.389.546,00	99,97	(3.901.176,00)	
4	4	04	01	1	3			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	11.839.290.722,00	11.835.389.546,00	-	11.835.389.546,00	99,97	(3.901.176,00)	
4	4	04	01	1	3	01		BAGI LABA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSDA/BUMD	11.839.290.722,00	11.835.389.546,00	-	11.835.389.546,00	99,97	(3.901.176,00)	
4	4	04	01	1	3	01	01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Bank KAL-SEL Cabang Kotabaru	11.589.290.722,00	11.589.290.722,00	-	11.589.290.722,00	100,00	-	
4	4	04	01	1	3	01	02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	250.000.000,00	246.098.824,00	-	246.098.824,00	98,44	(3.901.176,00)	
4	x	x	xx	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	59.472.215.403,00	98.342.475.576,85	17.688.255.136,11	116.030.730.712,96	195,10	56.558.515.309,96	
4	1	02	01	1	4			DINAS KESEHATAN	8.000.000.000,00	8.385.837.384,00	1.170.531.498,00	9.556.368.882,00	119,45	1.556.368.882,00	
4	1	02	01	1	4	22		Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.000.000.000,00	8.385.837.384,00	1.170.531.498,00	9.556.368.882,00	119,45	1.556.368.882,00	
4	1	02	01	1	4	22	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.000.000.000,00	6.982.686.984,00	865.848.898,00	7.848.535.882,00	112,12	848.535.882,00	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	1	02	01	1	4	22	02	Pendapatan Dana JKN Non Kapitasi	1.000.000.000,00	1.403.150.400,00	304.682.800,00	1.707.833.000,00	170,78	707.833.000,00	
4	1	02	02	1	4			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU	40.000.000.000,00	65.222.821.589,07	12.856.096.550,99	78.078.918.140,06	195,20	38.078.918.140,06	
4	1	02	02	1	4	16		Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	40.000.000.000,00	65.222.821.589,07	12.856.096.550,99	78.078.918.140,06	195,20	38.078.918.140,06	
4	1	02	02	1	4	16	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	39.446.760.000,00	55.845.489.130,00	4.692.512.869,00	60.538.001.999,00	153,47	21.091.241.999,00	
4	1	02	02	1	4	16	04	Pendapatan Lain-lain BLUD	553.240.000,00	9.377.332.459,07	8.163.583.681,99	17.540.916.141,06	3.170,58	16.987.676.141,06	
4	3	03	02	1	4			DINAS PERTANIAN	5.000.000,00			-	-	(5.000.000,00)	
4	3	03	02	1	4	01		PENJUALAN ASET DAERAH YANG TAK DIPISAHKAN	5.000.000,00			-	-	(5.000.000,00)	
4	3	03	02	1	4	01	16	Penjualan Hasil Peternakan	5.000.000,00			-	-	(5.000.000,00)	
4	4	04	01	1	4			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	10.561.300.000,00	23.872.747.351,68	2.665.385.392,80	26.538.132.744,48	251,28	18.976.832.744,48	
4	4	04	01	1	4	02		PENERIMAAN JASA GIRO	2.561.300.000,00	5.324.383.324,31	148,71	5.324.383.471,02	207,88	2.763.083.471,02	
4	4	04	01	1	4	02	01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	5.260.783.041,25	-	5.260.783.041,25	210,43	2.760.783.041,25	
4	4	04	01	1	4	02	02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	61.300.000,00	63.600.283,06	148,71	63.600.429,77	103,75	2.300.429,77	
4	4	04	01	1	4	03		PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	5.000.000.000,00	11.676.027.397,25	1.531.849.315,06	13.207.876.712,31	264,16	8.207.876.712,31	
4	4	04	01	1	4	03	01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Deposito)	5.000.000.000,00	11.676.027.397,25	1.531.849.315,06	13.207.876.712,31	264,16	8.207.876.712,31	
4	4	04	01	1	4	04		TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	2.500.000.000,00	3.834.664.398,89	386.978.038,00	4.221.642.436,89	168,87	1.721.642.436,89	
4	4	04	01	1	4	04	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.500.000.000,00	3.834.664.398,89	386.978.038,00	4.221.642.436,89	168,87	1.721.642.436,89	
4	4	04	01	1	4	06		PENDAPATAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	500.000.000,00	3.037.672.231,23	746.557.893,03	3.784.230.124,26	756,85	3.284.230.124,26	
4	4	04	01	1	4	06	03	Bidang Pekerjaan Umum	500.000.000,00	3.037.672.231,23	746.557.893,03	3.784.230.124,26	756,85	3.284.230.124,26	
4	4	04	04	1	4			BADAN PENDAPATAN DAERAH	905.915.403,00	861.069.252,10	998.241.894,32	1.867.310.946,42	205,02	951.395.543,42	
4	4	04	04	1	4	07		PENDAPATAN DENDA PAJAK	13.500.000,00	47.020.333,70	7.723.421,00	54.743.754,70	405,51	41.243.754,70	
4	4	04	04	1	4	07	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000,00	3.921.532,00	2.070.601,00	5.992.133,00	299,61	3.992.133,00	
4	4	04	04	1	4	07	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	-	-	-	-	-	
4	4	04	04	1	4	07	05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-	-	
4	4	04	04	1	4	07	06	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000,00	3.252.515,70	382.806,00	3.635.321,70	242,35	2.135.321,70	
4	4	04	04	1	4	07	07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	59.688,00	210.000,00	269.688,00	-	269.688,00	
4	4	04	04	1	4	07	08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-	-	-	-	
4	4	04	04	1	4	07	12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.000.000,00	39.786.598,00	5.060.014,00	44.846.612,00	448,47	34.846.612,00	
4	4	04	04	1	4	09		PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN	200.000.000,00	-	979.307.073,00	979.307.073,00	489,65	779.307.073,00	
4	4	04	04	1	4	09	01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	200.000.000,00	-	979.307.073,00	979.307.073,00	489,65	779.307.073,00	
4	4	04	04	1	4	10		PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	60.000.000,00	107.497.428,00	6.549.100,32	114.046.528,32	190,08	54.046.528,32	
4	4	04	04	1	4	10	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	60.000.000,00	107.497.428,00	6.549.100,32	114.046.528,32	190,08	54.046.528,32	
4	4	04	04	1	4	17		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	632.415.403,00	706.551.490,40	2.662.100,00	709.213.590,40	112,14	76.798.187,40	
4	4	04	04	1	4	17	01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	632.415.403,00	706.551.490,40	2.662.100,00	709.213.590,40	112,14	76.798.187,40	
4	x	x	xx	2				DANA PERIMBANGAN	2.454.117.075.368,00	2.305.796.050.162,00	95.059.354.565,00	2.400.854.404.717,00	97,83	(53.262.670.651,00)	
4	x	x	xx	2	1			BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.292.880.634.826,00	1.252.639.450.440,00	21.688.942.300,00	1.274.328.392.740,00	98,57	(18.552.242.086,00)	
4	4	04	01	2	1			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.292.880.634.826,00	1.252.639.450.440,00	21.688.942.300,00	1.274.328.392.740,00	98,57	(18.552.242.086,00)	
4	4	04	01	2	1	01		BAGI HASIL PAJAK	64.013.068.000,00	54.528.288.984,00	4.886.361.700,00	59.414.650.684,00	92,82	(4.598.417.316,00)	
4	4	04	01	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN PPh Pasal 21	13.815.955.000,00	8.289.573.000,00	-	8.289.573.000,00	60,00	(5.526.382.000,00)	
4	4	04	01	2	1	01	02	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	50.197.113.000,00	46.238.715.984,00	4.886.361.700,00	51.125.077.684,00	101,85	927.964.684,00	
4	4	04	01	2	1	02		BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.228.867.566.826,00	1.198.111.161.456,00	16.802.580.600,00	1.214.913.742.056,00	98,86	(13.953.824.770,00)	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	01	2	1	02	02	Bagi Hasil SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.918.857.000,00	575.657.100,00	-	575.657.100,00	30,00	(1.343.199.900,00)	
4	4	04	01	2	1	02	05	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara (Royalty)	1.221.036.172.826,00	1.191.622.929.381,00	202.764.600,00	1.191.825.693.981,00	97,61	(29.210.478.845,00)	
4	4	04	01	2	1	02	07	Bagi Hasil SDA Perikanan	5.638.599.000,00	5.638.599.000,00	-	5.638.599.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	1	02	08	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	273.938.000,00	273.938.000,00	-	273.938.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	1	02	11	Bagi Hasil Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	37.975,00	-	37.975,00	-	37.975,00	
4	4	04	01	2	1	02	12	Dana Bagi Hasil Sawit	-	-	16.599.816.000,00	16.599.816.000,00	-	16.599.816.000,00	
4	x	x	xx	2	2			DANA ALOKASI UMUM	607.614.720.000,00	561.498.585.948,00	32.124.469.748,00	593.623.055.696,00	97,70	(13.991.664.304,00)	
4	4	04	01	2	2			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	607.614.720.000,00	561.498.585.948,00	32.124.469.748,00	593.623.055.696,00	97,70	(13.991.664.304,00)	
4	4	04	01	2	2	01		Dana Alokasi Umum	607.614.720.000,00	561.498.585.948,00	32.124.469.748,00	593.623.055.696,00	97,70	(13.991.664.304,00)	
4	4	04	01	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum	607.614.720.000,00	561.498.585.948,00	32.124.469.748,00	593.623.055.696,00	97,70	(13.991.664.304,00)	
4	x	x	xx	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS	207.332.663.000,00	164.367.444.399,00	22.637.482.917,00	176.894.927.318,00	85,32	(30.437.635.684,00)	
4	4	04	01	2	3			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	207.332.663.000,00	164.367.444.399,00	22.637.482.917,00	176.894.927.318,00	85,32	(30.437.635.684,00)	
4	4	04	01	2	3	01		DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER	51.493.600.000,00	37.878.610.295,00	9.139.602.237,00	47.018.112.632,00	91,31	(4.475.387.468,00)	
4	4	04	01	2	3	01	02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	846.560.000,00			-	-	(846.560.000,00)	
4	4	04	01	2	3	01	21	DAK Fisik Reguler Bidang Jalan	15.536.957.000,00	10.875.869.900,00	3.257.033.999,00	14.132.903.899,00	90,96	(1.404.053.101,00)	
4	4	04	01	2	3	01	31	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - PAUD	586.054.000,00	586.054.000,00	-	586.054.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	01	32	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - SD	2.153.577.000,00	1.620.003.900,00	533.573.100,00	2.153.577.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	01	33	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - SMP	12.575.870.000,00	8.878.109.000,00	3.697.761.000,00	12.575.870.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	01	35	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB - Penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi	1.123.253.000,00	773.195.745,00	433.861.500,00	1.207.057.245,00	107,46	83.804.245,00	
4	4	04	01	2	3	01	39	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Peningkatan kesiapan sistem kesehatan	8.989.363.000,00	8.332.026.850,00	-	8.332.026.850,00	92,89	(657.336.150,00)	
4	4	04	01	2	3	01	44	DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum	4.556.418.000,00	3.189.492.600,00	1.217.272.638,00	4.406.765.238,00	96,72	(149.652.762,00)	
4	4	04	01	2	3	01	45	DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi	5.002.369.000,00	3.501.858.300,00	-	3.501.658.300,00	70,00	(1.500.710.700,00)	
4	4	04	01	2	3	01	50	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengendalian Penyakit	123.079.000,00	122.200.000,00	-	122.200.000,00	99,29	(879.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03		DAK IPD NON FISIK	166.839.063.000,00	118.478.834.104,00	13.397.980.680,00	129.878.814.784,00	83,34	(25.962.248.216,00)	
4	4	04	01	2	3	03	02	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5.374.200.000,00	2.253.888.985,00	-	2.253.888.985,00	41,94	(3.120.311.015,00)	
4	4	04	01	2	3	03	03	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG)	57.560.670.000,00	46.048.535.000,00	8.005.270.500,00	54.053.805.500,00	93,91	(3.506.864.500,00)	
4	4	04	01	2	3	03	04	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (TAMSI)	1.077.250.000,00	861.800.000,00	154.750.000,00	1.016.550.000,00	94,37	(60.700.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	05	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	506.886.000,00	405.508.800,00	39.303.380,00	444.812.180,00	87,75	(62.073.820,00)	
4	4	04	01	2	3	03	09	DAK Non Fisik BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.666.300.000,00	899.150.000,00	-	899.150.000,00	53,96	(767.150.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	11	DAK Non Fisik Dana Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM	369.370.000,00	366.930.000,00	-	366.930.000,00	99,34	(2.440.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	13	DAK Non Fisik dana fasilitasi penanaman modal	480.000.000,00	457.021.000,00	-	457.021.000,00	95,21	(22.979.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	14	DAK Non Fisik dana ketahanan pangan dan pertanian	756.650.000,00	756.642.500,00	-	756.642.500,00	100,00	(7.500,00)	
4	4	04	01	2	3	03	16	DAK Non Fisik BOK dan BOKB - Akreditasi puskesmas	34.736.221.000,00	18.813.930.100,00	5.198.656.800,00	24.012.586.900,00	69,13	(10.723.634.100,00)	
4	4	04	01	2	3	03	18	DAK Non Fisik BOK dan BOKB - Bantuan operasional keluarga berencana	6.930.198.000,00	4.519.059.724,00	-	4.519.059.724,00	65,21	(2.411.138.276,00)	
4	4	04	01	2	3	03	19	DAK Non Fisik BOS Reguler	43.597.400.000,00	38.651.367.995,00	-	38.651.367.995,00	88,66	(4.946.032.005,00)	
4	4	04	01	2	3	03	20	DAK Non Fisik BOS Kinerja	2.445.000.000,00	2.445.000.000,00	-	2.445.000.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	03	22	DAK Non Fisik-BOKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00			-	-	(338.918.000,00)	
4	x	x	xx	2	4			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	161.623.062.000,00	148.500.282.400,00	18.708.459.600,00	167.208.742.000,00	103,46	5.585.680.000,00	
4	4	04	01	2	4			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	161.623.062.000,00	148.500.282.400,00	18.708.459.600,00	167.208.742.000,00	103,46	5.585.680.000,00	
4	4	04	01	2	4	01		DANA PENYESUAIAN	161.623.062.000,00	148.500.282.400,00	18.708.459.600,00	167.208.742.000,00	103,46	5.585.680.000,00	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	01	2	4	01	00	Dana Desa (DD)	161.623.062.000,00	148.500.282.400,00	18.708.459.600,00	167.208.742.000,00	103,46	5.585.680.000,00	
4	x	x	xx	2	6				184.666.095.542,00	188.799.286.965,00	-	188.799.286.965,00	102,24	4.133.191.423,00	
4	4	04	01	2	6			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	184.666.095.542,00	188.799.286.965,00	-	188.799.286.965,00	102,24	4.133.191.423,00	
4	4	04	01	2	6	01		Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	184.666.095.542,00	188.799.286.965,00	-	188.799.286.965,00	102,24	4.133.191.423,00	
4	4	04	01	2	6	01	01	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.841.455.242,00	11.969.808.069,00	-	11.969.808.069,00	57,43	(8.871.647.173,00)	
4	4	04	01	2	6	01	02	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.129.826.914,00	13.857.549.681,00	-	13.857.549.681,00	68,84	(6.272.277.233,00)	
4	4	04	01	2	6	01	03	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	128.333.519.804,00	145.784.543.266,00	-	145.784.543.266,00	113,60	17.451.023.462,00	
4	4	04	01	2	6	01	04	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.560.458,00	570.594.272,00	-	570.594.272,00	189,84	270.033.814,00	
4	4	04	01	2	6	01	05	Bagi Hasil Pajak Rokok	15.060.733.124,00	16.616.791.677,00	-	16.616.791.677,00	110,33	1.556.058.553,00	
								JUMLAH PENDAPATAN	2.608.583.300.871,00	2.484.078.606.235,85	121.912.613.373,11	2.605.991.219.608,96	99,90	(2.592.081.262,04)	



Kotabaru, 31 December 2023
An. KEPALA BAPENDA
KABID PENAGIHAN

RIADI HAPIJIE, S.ST
PEMBINA
NIP. 19770502 200312 1 008